

TESIS

**REKONSTRUKSI REGULASI JASA HUKUM
CUMA-CUMA OLEH NOTARIS**



Oleh :

YUNIATI, S.H.

2120216320046

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
JULI 2023**

TESIS

**REKONSTRUKSI REGULASI JASA HUKUM
CUMA-CUMA OLEH NOTARIS**

Oleh :

YUNIATI, S.H.

2120216320046

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
JULI 2023**

Tesis ini telah
dipertahankan di depan sidang Panitia Penguji
pada tanggal 11 Juli 2023

PEMBIMBING UTAMA

Prof.Dr.H.M.Erham Amin, S.H.,M.H
NIP. 19580423198603 1 001

PEMBIMBING PENDAMPING

Dr.Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn
NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui oleh

Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

PENGESAHAN REVISI TESIS

Rekonstruksi Regulasi Jasa Hukum Cuma-Cuma oleh Notaris

disusun oleh

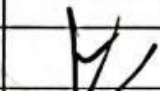


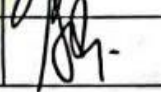

Nama : Yuniati, S.H

NIM : 2120216320046

Telah dipertahankan di depan dewan Penguji

Pada Tanggal:

Susunan Penguji

No	Nama	JABATAN	Tanda Tangan
1	Prof.Dr.H.M. Erham Amin,S.H.,M.H	Ketua Penguji	
2	Dr Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn	Sekretaris	
3	Prof.Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H.,M.H	Anggota	
4	Prof.Dr.Ifrani,S.H.,M.H.	Anggota	
5	Dr.Akmad Syaufi, S.H.,M.H	Anggota	

Mengetahui

Koordinator Program Studi Kenotariatan


Prof.Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H.,M.H
NIP.19730420 200312 2002

**Tesis ini telah
dipertahankan di depan sidang Panitia Penguji
pada tanggal 11 Juli 2023**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
: Dr. Akhmad Syaafi, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuniati, S.H.
NIM : 2120216320046
Program Studi : Kenotariatan
Judul Tesis : REKONTRUKSI REGULASI JASA HUKUM
CUMA-CUMA OLEH NOTARIS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
- 2.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 23 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Yuniati, S.H.
NIM. 2120216320046



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PROGRAM PASCASARJANA**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 335/UN8.4/SE/2023

Sertifikat ini diberikan kepada:

Yuniati

Dengan Judul Tesis:

Rekonstruksi Regulasi Jasa Hukum Cuma-Cuma oleh Notaris

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$, dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 17 Juli 2023

Direktur,



Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.

NIP. 196805071993031020

RINGKASAN

REKONTRUKSI REGULASI JASA HUKUM CUMA-CUMA OLEH NOTARIS

oleh :

¹ Yuniati, S.H. ² Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

³ Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, 109 Halaman

Alasan yang melatarbelakangi permasalahan ini untuk diangkat adalah ingin memperjelas pengembanan profesi notaris sebagaimana juga profesi-profesi lainnya yang merupakan profesi kepercayaan yang diangkat oleh Negara untuk mengemban tugas pelayanan untuk melayani masyarakat, yang lebih mengutamakan pelayanan daripada imbalan yang akan diterimanya, sebab kepentingan masyarakat merupakan sifat profesi yang mengedepankan pelayanan kepentingan.

Namun disamping mengedepankan pelayanan, menurut peneliti juga harus juga melihat dari kondisi dari profesi notaris itu sendiri, yang mana tentunya memerlukan biaya untuk kelangsungan hidupnya, sehingga kedua aspek ini menurut peneliti harus ada kajian tersendiri, sehingga menyajikan hasil yang dapat dipertimbangkan bagi pembuat undang-undang khususnya legislatif untuk dapat lebih balance dalam menghasilkan produk undang-undang.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisa terkait pengaturan hukum pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris kepada orang yang tidak mampu dan menganalisa rekonstruksi regulasi dalam pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris kepada orang yang tidak mampu.

Hasil penelitian diperoleh bahwa Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam pemberian jasa hukum secara cuma-cuma maka bersifat wajib dilaksanakan, sehingga menghancurkan seorang notaris untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, yang mana pemberian jasa hukum tersebut meliputi pada ketentuan Pasal 15 UUJN yaitu membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, mengesahkan tanda

¹ 2120216320046

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Pendamping

tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus dan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan notaris, adapun kewajiban ini membawa serta merta apabila notaris menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma sehingga hal tersebut dilarang karena melanggar ketentuan Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang tentu memiliki sanksi, yaitu bisa dapat Peringatan tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat dan Pemberhentian dengan tidak hormat adapun dasar sanksi tersebut berdasarkan Pasal 37 ayat 2 UUIJN. Dan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mana memang tujuannya baik dalam hal sosial, namun hal tersebut bertentangan jika dilandaskan pada UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang isinya “Tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Sehingga perlu direkonstruksi aturan hukum yang ada pada Pasal 37 UUIJN. Adapun bentuk rekonstruksi regulasi tersebut sebenarnya adalah agar hak hak dari notaris dapat dilindungi, karena berdasarkan Pasal 36 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

**RECONSTRUCTION OF LEGAL SERVICES REGULATIONS FOR FREE
BY NOTARIES**

¹ Yuniati, S.H. ² Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
³ Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Master of Notary Program, Lambung Mangkurat University, 109 Pages

ABSTRACT

Keywords : Reconstruction of Regulations, Only Legal Services by Notaries.

The purpose of this study is to examine and analyze the legal arrangements regarding the provision of legal services free of charge by notaries to people who can't afford it and to analyze the reconstruction of regulations in the provision of legal services free of charge by notaries to people who can't afford it. While the research method used is Normative legal research, namely a method that uses primary legal sources in the form of laws and regulations, legal theories and expert opinions, is analyzed and conclusions are drawn from the problems used to test and review legal materials. The research results obtained is that based on Article 37 paragraph 1 UUJN in the provision of legal services free of charge, it is obligatory to implement, thus requiring a notary to provide legal services in the notary field free of charge to people who cannot afford it, in which the provision of legal services includes provisions Article 15 of the UUJN, namely making authentic deeds regarding all actions, agreements and provisions required by laws and regulations and/or which are desired by interested parties to be stated in authentic deeds, legalizing signatures and determining the certainty of the date of private letters by registering in special books and make deeds related to notary land. And the provisions of Article 37 of the UUJN which have good intentions in social terms, but this is contradictory if it is based on the 1945 Constitution Article 27 paragraph 2, so that it is necessary to reconstruct the existing legal rules in Article 37 UUJN. The actual form of reconstructing the regulation is so that the rights of a notary can be protected, because based on Article 36 of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, a Notary has the right to receive an honorarium for legal services provided in accordance with their authority.

¹ Student number : 2120216320046

² Supervisor

³ Co-supervisor

REKONTRUKSI REGULASI JASA HUKUM CUMA-CUMA OLEH NOTARIS

oleh :

¹Yuniati, S.H. ²Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
³Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, 109 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci : Rekonstruksi Regulasi, Jasa Hukum Cuma Cuma oleh Notaris.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisa terkait pengaturan hukum pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris kepada orang yang tidak mampu dan menganalisa rekonstruksi regulasi dalam pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris kepada orang yang tidak mampu. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 UUJN dalam pemberian jasa hukum secara cuma cuma maka bersifat wajib dilaksanakan, sehingga menghancurkan seorang notaris untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, yang mana pemberian jasa hukum tersebut meliputi pada ketentuan Pasal 15 UUJN yaitu membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus dan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan notaris. Dan Ketentuan Pasal 37 UUJN yang mana memang tujuannya baik dalam hal sosial, namun hal tersebut bertentangan jika dilandaskan pada UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 ,Sehingga perlu direkonstruksi aturan hukum yang ada pada Pasal 37 UUJN. Adapun bentuk rekonstruksi regulasi tersebut sebenarnya adalah agar hak hak dari notaris dapat dilindungi, karena berdasarkan Pasal 36 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

¹ NIM 2120216320046

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Pendamping

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Meskipun dalam proses penyelesaiannya terdapat hambatan, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk memberikan hasil karya terbaik melalui usaha yang keras dan doa yang tiada henti dipanjatkan hingga terselesaikan tesis ini yang berjudul **“REKONSTRUKSI REGULASI JASA HUKUM CUMA-CUMA OLEH NOTARIS”**.

Tesis ini merupakan salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Prodi Magister Kenotariatan yang telah ditempuh kurang lebih dua tahun. Dengan segala rasa hormat dan terima kasih penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang sudah berpartisipasi, mendukung, mengarahkan dan membimbing penulis hingga terselesaikannya tesis ini, khususnya penulis tujukan kepada :

1. Kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Alm H. Ibrahlim dan Ibu Almh Hj. Maria Ulfah yang telah memberikan inspirasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi sesuai harapan beliau;
2. Yang Tercinta suami saya Bapak Teguh Prasetyo, SH dan yang tersayang kedua anak saya Nasywa Mutiara Zulfa dan Nur Azizah Humaira Zulfa yang selalu mendoakan, dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini;

3. Kakak dan adik yang saya sayangi Hj. Lutfiana, S.P., MM., Muhlis Ridhani, ST dan Surya Rizani yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini,
4. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan pada Magister Kenotariatan. Terima kasih atas segala bimbingan, saran, ilmu, arahan, serta waktu yang Ibu sediakan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga apa yang telah ibu berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;
6. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga sebagai Wakil Dekan Tiga yang telah membimbing, dan membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Bapak Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.. selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam membantu memberikan arahan dan masukan guna menyelesaikan tesis ini;
8. Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H, M.H. dan bapak Dr. Akhamd Syaufi, S.H., M.H. selaku dosen penguji dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu selama peneliti melaksanakan perkuliahan;

10. Seluruh Staf Akademik, Staf Keuangan, Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat terutama Bapak Muhammad Mirwan Noordin, S.E. selaku Staf Akademik Magister Kenotariatan dan Staf lain yang telah membantu selama perkuliahan.
11. Adik Tersayang Sri Aulia Ulfah, S.H., M.Kn. yang selalu kebersamai dan memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
12. Semua teman teman penulis di Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021 dan berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga segala yang telah diberikan mendapat berkah dari SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian yang penulis buat ini bisa bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu Kenotariatan.

Banjarmasin,
Hormat Penulis

Yuniati, S.H.
NIM. 2120216320046

DAFTAR ISI

Judul	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
HALAMAN PLAGIASI	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRACT	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	57
G. Sistematika Penulisan	62
BAB II PEMBERIAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU..	64
A. Hak dan Kewajiban Profesi Notaris dan Aspek Larangan Tindakan Non Profesional oleh Notaris	64

B. Dasar Hukum Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma.....	80
C. Aspek Hukum Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	85
D. Aspek Pengaturan UUJN dan Kode Etik Notaris Tidak Menjalankan Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma	88
 BAB III REKONSTRUKSI REGULASI DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU.....	
A. Regulasi Konsep Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma....	93
B. Rekonstruksi Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Notaris Kepada Orang Yang Tidak Mampu.....	97
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107
 DAFTAR PUSTAKA	